

**Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
bersama dengan AusAid
Menyelenggarakan Workshop**

**Penelitian Kebijakan Kesehatan
dan Kebijakan Medik:
BPJS sebagai titik singgung dan
siapa penelitinya?**

Yogyakarta, 11 – 12 Juni 2013

Tujuan kegiatan



1. Membahas topik penelitian kebijakan di BPJS yang membutuhkan kolaborasi antara FK dan FKM
2. Membahas situasi terakhir lembaga penelitian di FKM dan FK yang tertarik pada kebijakan kesehatan dan kebijakan medik dan masa depannya.
3. Membahas hubungan dan sinergi antara lembaga penelitian kebijakan kesehatan di FKM dan FK dalam Jaringan Kebijakan Kesehatan untuk penelitian kebijakan BPJS

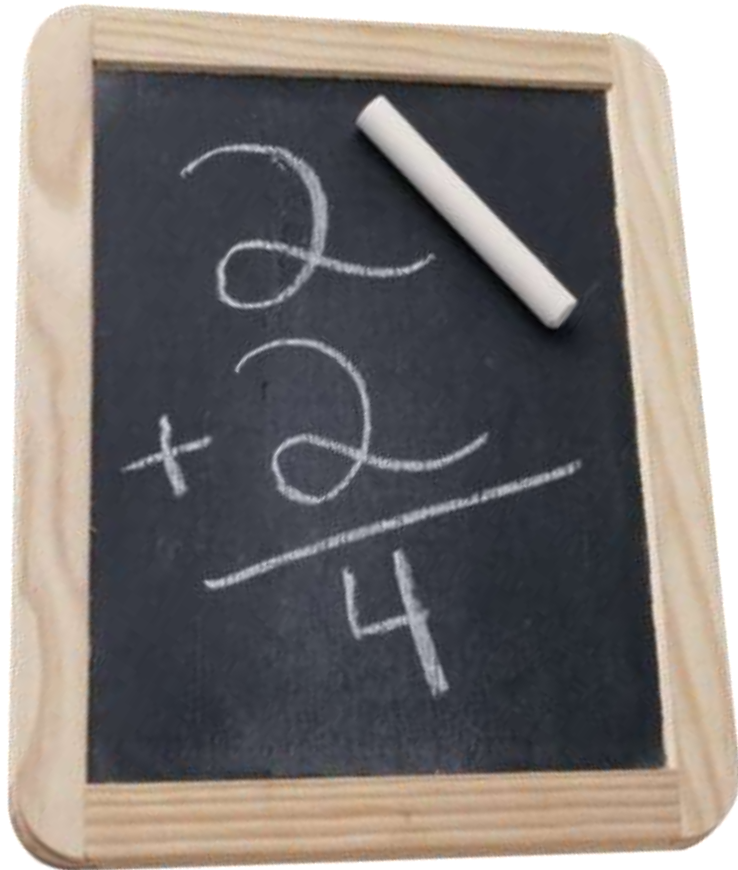


Tujuan 1

Membahas topik penelitian kebijakan di BPJS yang membutuhkan kolaborasi antara FK dan FKM

Pengantar

- Penelitian kebijakan kesehatan saat ini semakin berkembang dan dilaksanakan oleh universitas.
- Apa beda kebijakan publik, kebijakan kesehatan dan kebijakan medik?
- Apa peran universitas dalam pelaksanaan SJSN dan BPJS?



- Kebijakan Publik, kebijakan kesehatan, dan Kebijakan Medik

- Apa yang disebut sebagai Policy (Kebijakan)?
- Apa yang disebut sebagai Health Policy (Kebijakan Kesehatan)
- Apa yang disebut sebagai Kebijakan Medik?

Policy



- Decision taken by those with responsibility for a given policy area
- Kebijakan dapat ditetapkan oleh lembaga disektor pemerintah atau swasta
- Kebijakan dapat ditetapkan di berbagai level pemerintah

Public Policy

- Merujuk pada kebijakan pemerintah



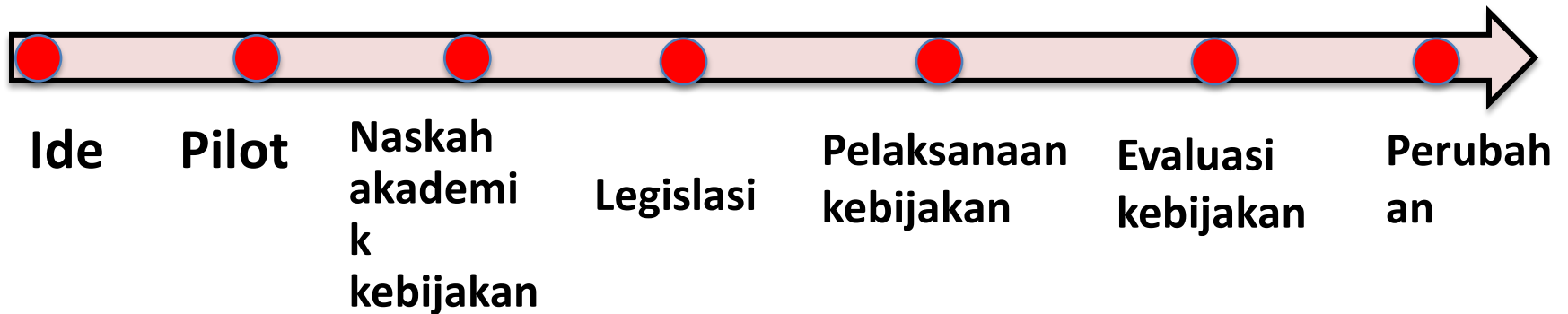
Kebijakan pusat

- UU
- PP
- Kepres
- Permenkes
-

Kebijakan daerah

- Peraturan Daerah
- Peraturan Gubernur
- Peraturan Walikota/Bupati
-

Langkah-langkah dalam pengembangan kebijakan publik



Health Policy

- Courses of Action (and inaction) that affect the set of institutions, organizations, services, and funding arrangements of the health system
- Mencakup public and private sector policies.

Contoh Health Policy

- Kebijakan imunisasi
- Kebijakan sanitasi lingkungan
- Kebijakan perumahan sehat
- Kebijakan kenaikan cukai untuk mengurangi perokok
- Kebijakan mengurangi intake gula untuk mencegah kegemukan
-
- ...

Medical Policy

Mulai dari Kebijakan Pelayanan Primer



sampai dengan

Kebijakan Pelayanan Sekunder dan Tertier (Misal kebijakan mutu pelayanan klinik, kebijakan DRG-INACBG)

Contoh kebijakan medik:

- Kebijakan pelayanan primer dengan dokter sebagai pelaku utama fungsi gate keeper sistem jaminan;
- Sistem pembayaran tenaga dokter di Indonesia dalam system jaminan kesehatan;
- Pathways, DRG dan INA-CBG
- Reformasi pendidikan residen

Contoh kebijakan medik (2)

- RUU Pendidikan Kedokteran;
 - Kebijakan pengembangan mutu klinik;
 - Kebijakan tentang peran perhimpunan profesi dan asosiasi dalam system kesehatan;
 - Kebijakan Medical Technology;
- dan lain sebagainya.

Siapa yang meneliti kebijakan kesehatan dan kebijakan medik?

Peneliti di
Fakultas Kesehatan Masyarakat

Apa contohnya?

- Kebijakan sanitasi lingkungan
- Kebijakan penambahan gizi
-

Peneliti di
Fakultas Kedokteran

Apa contohnya?

- Kebijakan DRGs
- Kebijakan mengenai hemodialisis
-
-

Kecenderungan terpisah

Topik apa yang menyatukan peneliti di FK dan FKM?

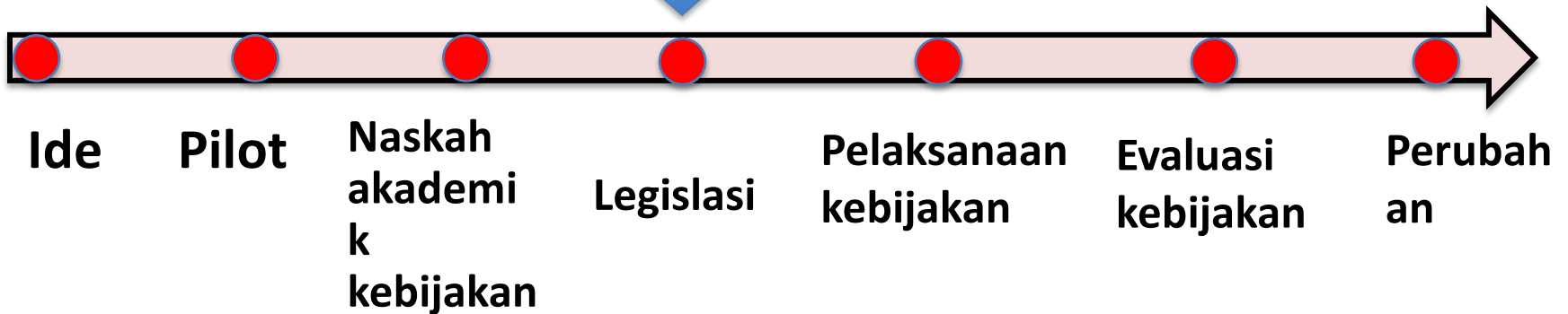
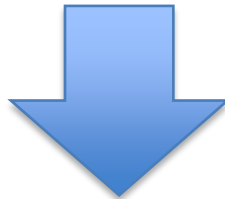
Peneliti di
Fakultas Kesehatan Masyarakat

Peneliti di
Fakultas Kedokteran

**Misal:
Kebijakan BPJS**

**Kebijakan
mengurangi kematian
Ibu dan Anak**

Kebijakan BPJS



Apakah penelitian kebijakan BPJS dilakukan oleh unit di Fakultas Kesehatan Masyarakat, ataukah di Fakultas Kedokteran, ataukah keduanya atau bekerjasama

- Akan dibahas pada Sesi 1 dan terakhir.



Tujuan 2:

Membahas situasi terakhir lembaga penelitian di FKM dan FK yang tertarik pada kebijakan kesehatan dan kebijakan medik dan masa depannya.

Hari 1

11.00 – 12.30

- Diskusi Mengenai Situasi Unit Penelitian Kebijakan Kesehatan dan Kebijakan Medik di FK dan FKM
- Bahan yang akan dibahas adalah hasil pelatihan yang dilakukan dan pengamatan di beberapa fakultas

Pembicara :

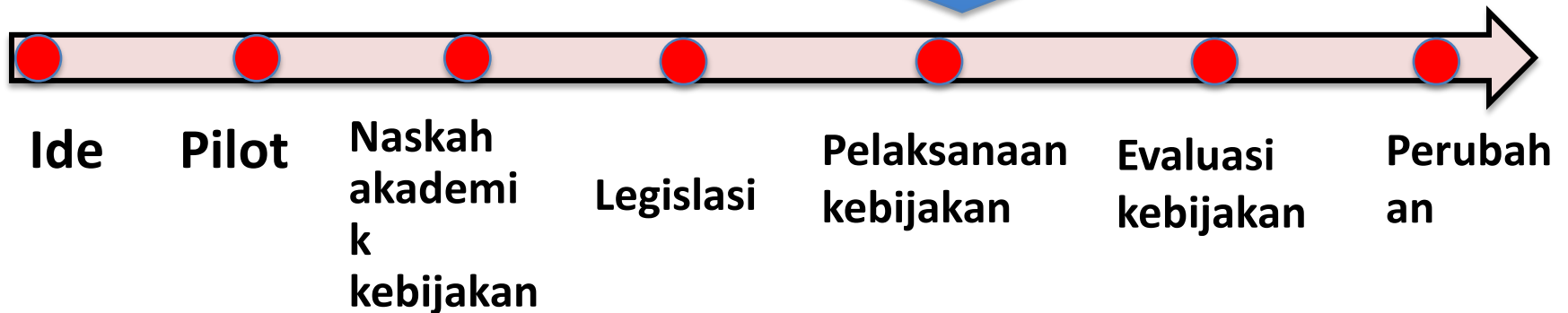
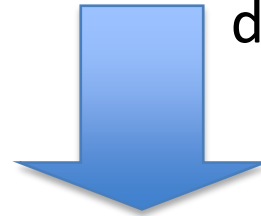
- Universitas Padjajaran
- Universitas Mulawarman
- Universitas Nusa Cendana



Tujuan 3:

Membahas hubungan dan sinergi antara lembaga penelitian kebijakan kesehatan di FKM dan FK dalam Jaringan Kebijakan Kesehatan untuk penelitian kebijakan BPJS

Kebijakan BPJS (UU SJSN dan UU BPJS) perlu dimonitor dan dievaluasi



Siapa pelaku monitoring?

Kemenkes, BPJS, atau pihak luar yang independen?

Dalam UU disebutkan pihak monev independen adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Catatan:

- Kata kunci

Independen



- Apa artinya?

Hari 1:

13.30 – 15.00

- BPJS sebagai titik singgung kebijakan medik dan kesehatan dalam penelitian monitoring dan evaluasi yang independen.
- Program Monitoring dan Evaluasi BPJS akankah menjadi tanggungjawab P2JK?
- Bagaimana rencana OJK sebagai pengawas independen untuk BPJS

Diskusi: Dimana peran FK-FKM dalam pengawasan program Jaminan secara independen? Apakah universitas dapat independen? Apakah universitas dapat bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan?

Pembicara :

- Kepala Group Penelitian dan Pengembangan PT ASKES Indonesia
- Kepala P2JK Kementerian Kesehatan
- Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Otoritas dan Direktur Pengawasan Khusus dan Penyelidikan Industri Keuangan NonBank - Kementerian Keuangan

Moderator : Dr. dr. Deni K Sunjaya, DESS

Selanjutnya:

- Apakah Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dapat berlaku sebagai lembaga independen?
- Darimana sumber dana untuk penelitian kebijakan BPJS?
- Apakah perguruan tinggi mempunyai dana penelitian untuk topik terapan ini?

Hari 1: Diskusi tentang Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

15.00 – 16.30

- Rencana Pengembangan Yayasan dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
- Perkembangan Jaringan dan Yayasan
- Sumber dana dari perguruan tinggi: Apakah dapat menggunakan dana-dana dari universitas sendiri atau dari Dikti?

Fasilitator : Prof. Dr. dr. H. Alimin Maidin, MPH

Pembicara: DP2M DIKTI dan Ketua LPPM UGM

Hari 2

08.30 – 10.00: Review Hari 1.

- Hambatan dan Solusi untuk Mengatasi Masalah, terkait dengan tugas dosen yang harus melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peran konsultan/peneliti bukan Dosen
- Peran Yayasan dan Jaringan Kebijakan Kesehatan
- Sinergi antara FK dan FKM, atau Bagian IKM dengan Bagian-bagian klinis di FK dalam konteks BPJS

Fasilitator: Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D

10.30 – 12.30

Membahas prospek pembiayaan penelitian payung dan strategi mencarinya.

Kemungkinan sumber dana:

- Sumber dana mandiri, dari universitas masing-masing
- Sumber dana dari BPJS atau OJK
- Sumber dana dari Kementerian Kesehatan: Balitbang Kemenkes
- Sumber dana dari badan-badan penelitian asing

Pembicara :

- Kepala Balitbangkes Kementerian Kesehatan
- AusAid
- FK Universitas Diponegoro
- FK Universitas Muhamadiyah Jakarta

Moderator : Dr. dr.Felix Kasim, M.Kes

- **Dilanjutkan diskusi kelompok mengenai kemungkinan sumber pendanaan**

Program diakhiri dengan:

- Diskusi mengenai harapan dan Plan of Action kegiatan ini
 - 13.30 – 15.00
 - Diskusi mengenai Persiapan Teknis Kerjasama Multi Centre dan pertemuan nasional di Kupang tanggal 4 – 7 September 2013.**
 - Harapan mengenai Manfaat Jaringan Kasus Universal Coverage: Pembicara : Dr. Budiono Santoso, Ph.D
 - Persiapan teknis kerjasama multi centre
 - Persiapan pertemuan nasional di Kupang untuk membahas rencana penelitian multi-center mengenai monitoring BPJS di tahun 2014
 - Fasilitator : Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D

Selamat melakukan workshop